



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FERRY ARDIYANTO**
2. Jabatan : **ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL**
3. NHK : **155293**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.248.300.000**

1. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.650.000.000
3. Tanah Seluas 4.686 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 234.300.000
4. Tanah Seluas 680 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 34.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **392.600.000**

1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT S 150 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 57.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **45.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **2.171.785.871**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **5.857.685.871**

III. HUTANG Rp. **913.229.711**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.944.456.160

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.